

## Kinerja kelembagaan hutan Desa Mesale di Desa Malitu Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso

Mersi Tangkearung<sup>1\*</sup>, Golar<sup>1</sup>, Arman Maiwa<sup>1</sup>, Imran Rachman<sup>1</sup>, Andi Sahri Alam<sup>1</sup>, Hamka<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Kehutanan, Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah, Indonesia,

Jl. Soekarno Hatta No.KM. 9, Tondo, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah 941482<sup>c</sup>

\*E-mail: [mersytangkearung23@gmail.com](mailto:mersytangkearung23@gmail.com)

Artikel diterima :30 November 2024 Revisi diterima 14 Januari 2025

### ABSTRACT

Social forestry functions as a management strategy that allows community access to forestry resources. The way forests are utilized in social forestry aligns with their role in production and protection, which includes offering timber, non-timber goods, and various ecosystem services. This research aimed to assess how well the Mesale Village Forest institution performs and identify factors that affect it. A purposive sampling method was employed to select both the location and respondent samples, resulting in 22 direct beneficiaries. The study adopted a quantitative descriptive approach. After collecting data on institutional administration, group activities, and reporting from participants, the information was analyzed using the Likert Scale method. The findings revealed that the performance of the Mesale village forest institution was rated fairly positively, as the local community had limited understanding of how to effectively use the forest. Insights from the KPH assistants, the Village Head, the Management, and the Mesale LPHD members indicated that community members primarily grasped the concepts of HD planning and work programs. Each activity outlined in the Mesale LPHD work planning required support and motivation from various sources concerning administrative expertise and HD usage. The most significant factor impacting institutional performance was the availability or lack of funding for the organization. Thus, there is a necessity to enhance LPHD performance by improving community awareness and engagement, along with fostering more sustainable forest management practices. This would lead to beneficial outcomes for village well-being and the preservation of the forest ecosystem.

**Keyword:** Village Forest Management Institution (VFMI), Village Forest, Performance, Malitu Village

### ABSTRAK

Perhutanan sosial berfungsi sebagai cara dalam mengelola hutan yang memberi peluang dan akses kepada masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan. Penggunaan hutan yang mengikuti prinsip perhutanan sosial disesuaikan dengan dua peran utama, yaitu produksi dan konservasi, mencakup penyediaan kayu, produk non-kayu, serta berbagai layanan lingkungan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi kinerja lembaga Hutan Desa Mesale dan mengenali faktor-faktor yang berpengaruh terhadap lembaga tersebut. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan non-probability sampling yang ditentukan secara sengaja, memilih tempat untuk pengumpulan data dan responden, dengan total sampel sebanyak 22 orang yang berhak mendapatkan manfaat langsung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif deskriptif. Setelah data mengenai administrasi lembaga, aktivitas kelompok, dan laporan lembaga dikumpulkan dari responden, data tersebut akan dianalisis menggunakan Skala Likert. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja lembaga hutan desa Mesale tergolong cukup baik, karena masyarakat desa Malitu hanya memiliki pemahaman yang terbatas mengenai pemanfaatan hutan. Informasi dari pendamping KPH, Kepala Desa, Pengurus, dan anggota Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Mesale menunjukkan bahwa anggota hanya paham tentang rencana pengelolaan hutan desa dan program kerja yang telah ditetapkan. Setiap aktivitas dalam rencana kerja Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Mesale memerlukan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak yang memiliki pengetahuan tentang administrasi dan pengelolaan hutan desa. Salah satu aspek penting yang mempengaruhi kinerja lembaga adalah ketersediaan dana untuk institusi tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya untuk memperbaiki kinerja Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) dengan meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat, serta pengelolaan hutan yang lebih berkelanjutan. Langkah ini akan memberikan efek positif bagi kesejahteraan desa dan kelestarian ekosistem hutan.

**Kata kunci:** Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD), Hutan Desa, Kinerja, Desa Malitu.

## PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 mengindikasikan bahwa hutan sebagai sumber daya alam memiliki potensi untuk memberikan efek yang signifikan untuk kesejahteraan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Efek langsung yang diperoleh dari hutan antara lain sumber kayu untuk konstruksi, bahan baku untuk pembuatan pulp dan kertas, serta tempat tinggal untuk berbagai spesies hewan, dan lain-lain. Sedangkan manfaat tidak langsung termasuk peran hutan sebagai tempat ekowisata dan penyedia oksigen. Keberhasilan pengelolaan hutan sangat bergantung pada partisipasi masyarakat yang tinggal di dekatnya. Untuk memaksimalkan manfaat hutan dan memberikan keuntungan bagi penduduk, semua kawasan hutan perlu dipergunakan dengan mempertimbangkan jenis, karakteristik, dan kerentanan serta memastikan fungsi utamanya tetap sama (Damanik, 2019). Di Indonesia, konsep perhutanan sosial telah diterapkan dalam berbagai bentuk sejak tahun 1989 (Wulandari & Inoue, 2018). Saat ini, konsep tersebut diimplementasikan melalui program pemerintah yang dikenal dengan perhutanan sosial, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 83 Tahun 2016. Tujuannya adalah untuk memperkuat partisipasi masyarakat setempat (Apriananda dkk., 2021).

Pemerintah menyediakan dukungan kepada masyarakat untuk bersama-sama mengelola hutan melalui program perhutanan sosial, yang mencakup hutan rakyat, hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan adat, serta kemitraan. Tujuan dari pengembangan perhutanan sosial adalah untuk memperkuat keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup warga setempat (Apriananda dkk., 2021). P.83/Menhut-II/2016 menjadi dasar hukum untuk penerapan perhutanan sosial. Berdasarkan regulasi ini, hutan desa termasuk dalam salah satu kategori perhutanan sosial. Warga yang tinggal di sekitar hutan (dalam hal ini, hutan desa) berfungsi aktif dalam pengelolaan hutan desa, dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan desa (Mahendra, 2022).

Pengelolaan perhutanan sosial adalah suatu metode untuk mengatur sumber daya hutan yang memberi peluang kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses pengelolaan. Pemanfaatan hutan dalam konteks ini disesuaikan dengan fungsi hutan, yang meliputi produksi serta perlindungan,

sambil menyediakan layanan lingkungan seperti kayu dan produk non-kayu (Pribadi dkk., 2023).

Kelembagaan berfungsi sebagai wadah yang mencakup aturan, etika, dan kode etik untuk mengakomodasi kegiatan. Kelembagaan dalam proses ini disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai di wilayah sasaran, salah satunya adalah lembaga pengelola hutan (Uma, 2022). Penelitian (Apriandana dkk., 2021) ” faktor kelemahan belum efektifnya kinerja lembaga diakrenakan pembinaan terhadap masyarakat belum efektif dilakukan, yaitu peluang pemasaran hasil hutan, bentuk kerjasama-rencana dengan para mitra dari berbagai usaha”. Penelitian Triambodo & Damanik (2015) menunjukkan bahwa lembaga dapat berfungsi sebagai wadah maupun motor penggerak dalam mendukung dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam berbagai sektor.

Hutan Desa Mesale, yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10256/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2022, telah beroperasi sejak tahun 2022 dengan cakupan wilayah 1.131 Ha di kawasan Hutan Produksi Tetap. Keberadaannya di bawah pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Sintuwu Maroso menunjukkan upaya signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan desa melalui skema perhutanan sosial. Namun, meskipun Hutan Desa Mesale memiliki potensi besar, sejumlah permasalahan masih menghambat optimalisasi pengelolannya, yang perlu diteliti lebih lanjut. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah dinamika kelembagaan yang masih belum sepenuhnya stabil. Kinerja lembaga pengelola, baik pemerintah desa maupun masyarakat, berperan penting dalam kelancaran pengelolaan hutan desa. Proses penguatan kapasitas lembaga pengelola sering kali terhambat oleh minimnya sumber daya manusia yang terlatih dan keterbatasan dalam hal akses informasi serta dana. Selain itu, ketidakmerataan dalam pembagian manfaat yang diperoleh dari hasil hutan turut menambah kompleksitas hubungan antara masyarakat dan pengelola hutan.

Berdasarkan segi kondisi dan tutupan lahan, meskipun hutan ini berada di kawasan yang memiliki potensi untuk dikelola secara berkelanjutan, perubahan tutupan lahan akibat aktivitas ilegal dan konversi lahan menjadi salah satu masalah yang perlu perhatian serius. Aktivitas tersebut tidak hanya merusak ekosistem hutan, tetapi juga mengancam keberlanjutan sumber daya alam yang ada, yang seharusnya dimanfaatkan

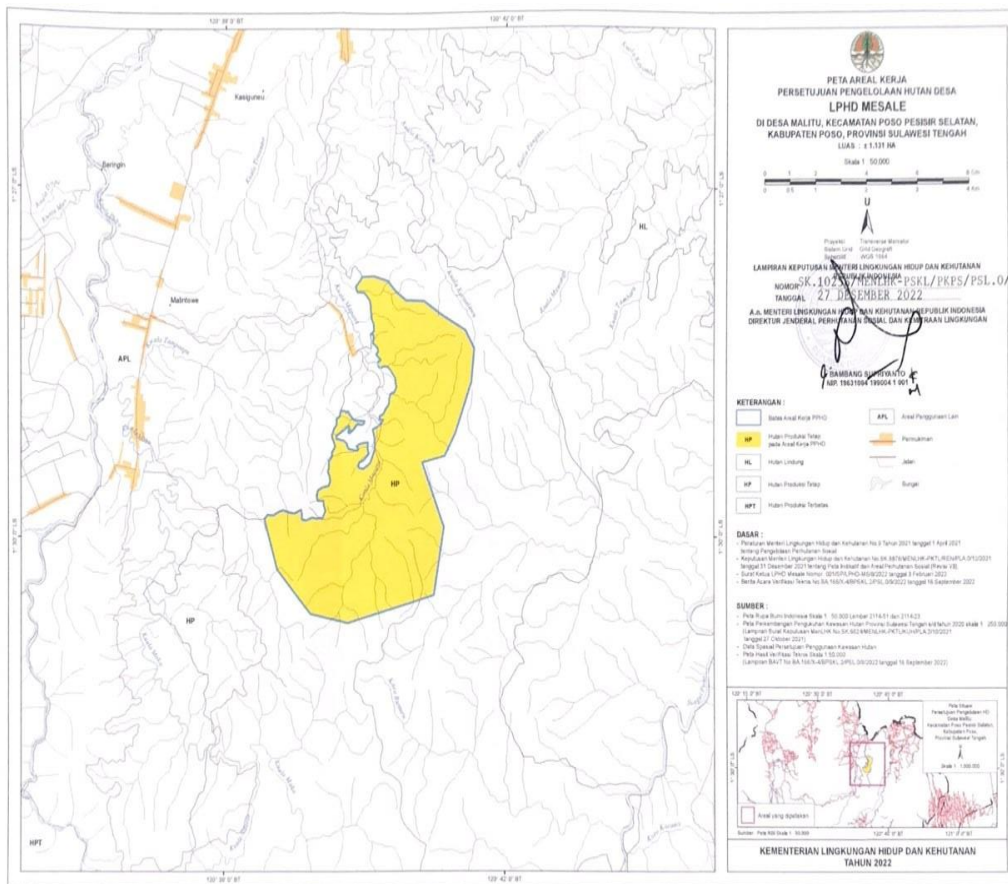
secara bijaksana untuk kesejahteraan masyarakat desa. Ketidaksiharian antara perencanaan dan implementasi pengelolaan yang ada, terutama dalam hal pengawasan, menyebabkan tantangan besar bagi kelestarian hutan itu sendiri. Dari sisi sosial, meskipun masyarakat desa memiliki potensi untuk terlibat dalam pengelolaan hutan, efektif. Untuk itu, perlu dilakukan penelitian mengenai kinerja kelembagaan Hutan Desa Mesale sangat penting dilakukan guna menilai sejauh mana perhutanan sosial benar-benar memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret terkait penyusunan strategi penguatan kapasitas lembaga pengelola, penataan ulang

masih terdapat resistensi atau kurangnya pemahaman terhadap manfaat jangka panjang dari pengelolaan hutan berbasis sosial. Dalam beberapa kasus, kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat juga disebabkan oleh keterbatasan kapasitas dalam hal pengetahuan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan pengelolaan hutan secara pengelolaan tutupan lahan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan.

## METODE PENELITIAN

### Lokasi Penelitian

Studi ini dilakukan selama tiga bulan, dari April hingga Juni tahun 2024, dengan lokasi penelitian berada di Desa Malitu, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, Kabupaten Poso.



Gambar 1. Peta Lokasi LPHD

### Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode non probability sampling yang ditentukan secara sengaja (*purposive sampling*) baik untuk data lokasi maupun sampel responden. Teknik ini dapat diartikan sebagai suatu Teknik pengambilan sampel berdasarkan ciri atau sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel variabel-variabel berdasarkan sumber data dengan pertimbangan tertentu yakni sumber data yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan. (Ernanda, D., & Sugiyono, S., 2017).

Dalam konteks ini, responden yang menyusun sampel dalam penelitian diambil melalui metode non-probabilitas dengan teknik yang dipilih secara sengaja (*purposive sampling*), yaitu:

1. KPH Sintuwu Maroso
2. Kepala Desa
3. Ketua LPHD Mesale
4. Bendahara LPHD Mesale
5. Anggota kelompok LPHD Mesale

Sampel sebanyak dua puluh dua (22) orang ini ditetapkan sebagai responden yang akan di

wawancara menggunakan pertanyaan kuesioner yang telah di siapkan, lalu dilihat jawaban responden yang paling relevan dengan tujuan penelitian. Sampel yang telah ditentukan diambil dengan rumus arikunto yang menyatakan bahwa jika populasi melebihi 100, maka margin kesalahan yang diterapkan adalah antara 10-15% (Sulastri & Suhartoyo, 2019). Hal ini didasari oleh teknik *purposive sampling* yang mengharuskan peneliti untuk mencermati tujuan penelitian dan karakteristik sampel dalam proses penetapannya (Abubakar, 2021).

### Analisis Data

#### Kriteria Indikator Penilaian

Kinerja kelembagaan Hutan dapat dievaluasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.43/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2016 mengenai Pedoman Umum untuk penyelenggaraan kompetisi dan pemberian penghargaan Wana Lestari

**Tabel 1.** Aspek penilaian berdasarkan kriteria pengelola hutan desa (HD).

No.	Kriteria/Indikator	Skor	Keterangan
<b>I.</b>	<b>Administrasi dan Kelembagaan (20%)</b>		
<b>1.</b>	<b>Organisasi dan Struktur organisasi :</b>		
	a. Terdapat organisasi, struktur dan penugasan yang terperinci	3	
	b. Terdapat organisasi, struktur dan penugasan yang tidak terperinci	2	
	c. Hanya ada struktur	1	
<b>2.</b>	<b>Penetapan PPHD (Persetujuan Pengelolaan HD)</b>		
	a. Sudah disetujui oleh Menteri LHK	3	
	b. Sedang dalam proses oleh MLHK	2	Lampirkan SK
	c. Belum ada	1	
<b>3.</b>	<b>Memiliki dokumentasi administrasi kelompok (keuangan, Notulen rapat, barang, surat keluar masuk)</b>		
	a. Lengkap (terdapat 4 dari 4 elemen)	3	
	b. Cukup (terdapat 3 dari 4 elemen)	2	
	c. Kurang (terdapat 2 dari 4 elemen )	1	
<b>4.</b>	<b>Tersedianya norma atau peraturan tertulis terkait kelompok dan perlindungan wilayah</b>		
	a. > 5 norma	3	
	b. 2 - 5 norma	2	Lampirkan SK
	c. < 2 norma	1	
	<b>JUMLAH I.</b>		
<b>II.</b>	<b>Aktivitas Kelompok (60%)</b>		
<b>1.</b>	<b>Jumlah pengelola HD yang berpartisipasi dalam pelatihan</b>		
	a. > 5 orang	3	
	b. 2 – 5 orang	2	

No.	Kriteria/Indikator	Skor	Keterangan
	c. < 2 orang	1	
2.	Perencanaan pengembangan usaha HHBK dalam peneglolaan HD ;		
	a. > 5 rencana usaha	3	
	b. 3 – 5 rencana usaha	2	
	c. < 3 rencana usaha	1	
3.	Kegiatan pengembangan HHBK yang sedang berjalan/menghasilkan tambahan pendapatan :		
	a. > 5 kegiatan	3	
	b. 3 – 5 kegiatan	2	Sebutkan :
	c. < 3 kegiatan	1	
4.	Kegiatan rehabilitas yang sudah dilakukan :		
	a. vegetative dan bangunan untuk konservasi air	3	Sebutkan :
	b. tumbuhan MPT berkayu (durian, kemiri dll)	2	
	c. tumbuhan MPT tidak berkayu (kopi, cokelat)	1	
5.	Kemitraan usaha :		
	a. Sudah memiliki koperasi yang memasarkan HHBK	3	
	b.Sudah memiliki koperasi namun belum memasarkan HHBK	2	
	c. Belum memiliki koperasi	1	
6.	Pertemuan rutin pengelola HD		
	a. > 1 kali dalam sebulan	3	Sebutkan :
	b. < 1 kali dalam sebulan	2	
	c. Tidak teratur	1	
<b>JUMLAH II.</b>			
<b>III. Pelaporan (20%)</b>			
1.	Penyampaian laporan		
	a. Tidak lengkap	3	Salinan dokumen
	b. Tepat waktu tetapi tidak lengkap	2	
	c. Tidak tepat waktu dan tidak lengkap	1	
2.	Dokumentasi kegiatan		
	a. Terdapat foto dokumentasi dari persiapan hingga distribusi	3	
	b. terdapat foto dokumentasi dari persiapan, namun tidak ada foto pada saat distribusi	2	Sebutkan :
	c. Terdapat foto dokumentasi dari persiapan hingga distribusi tetapi tidak lengkap	1	

**Tabel 2. Rekapitulasi nilai**

No.	Kriteria Penilaian	Maksimal Skor	Jumlah Skor	Bobot (%)	Nilai
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	Administrasi dan kelembagaan	12		20	
<b>II</b>	Aktivitas kelompok	18		60	
<b>III</b>	Pelaporan	6		20	
	Total nilai :	36		100	

**Analisis Data**

Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif, sesuai dengan yang dinyatakan oleh Sugiyono (2018), pendekatan kuantitatif mencakup

pengumpulan informasi dalam bentuk angka yang dianalisis secara statistik. Metode ini dimanfaatkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Setelah mengumpulkan data mengenai manajemen kelembagaan, kegiatan kelompok, dan

laporan dari responden, data tersebut dianalisis menggunakan Skala Likert. Alat ini dibuat untuk menilai sikap, perspektif, serta pandangan individu atau kelompok terhadap suatu isu sosial (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini, Skala Likert digunakan untuk menilai hasil dari wawancara terkait manajemen, aktivitas, dan laporan dari Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD). Rentang skor yang digunakan untuk mengklasifikasikan tingkat kinerja Hutan Desa meliputi kategori sangat baik dengan skor antara 80 sampai 100, kategori baik dengan skor antara 60 sampai 80, kategori cukup dengan rentang skor 40 sampai 60, dan kategori kurang dengan rentang skor 0 sampai 40 (Wijaya dkk., 2021).

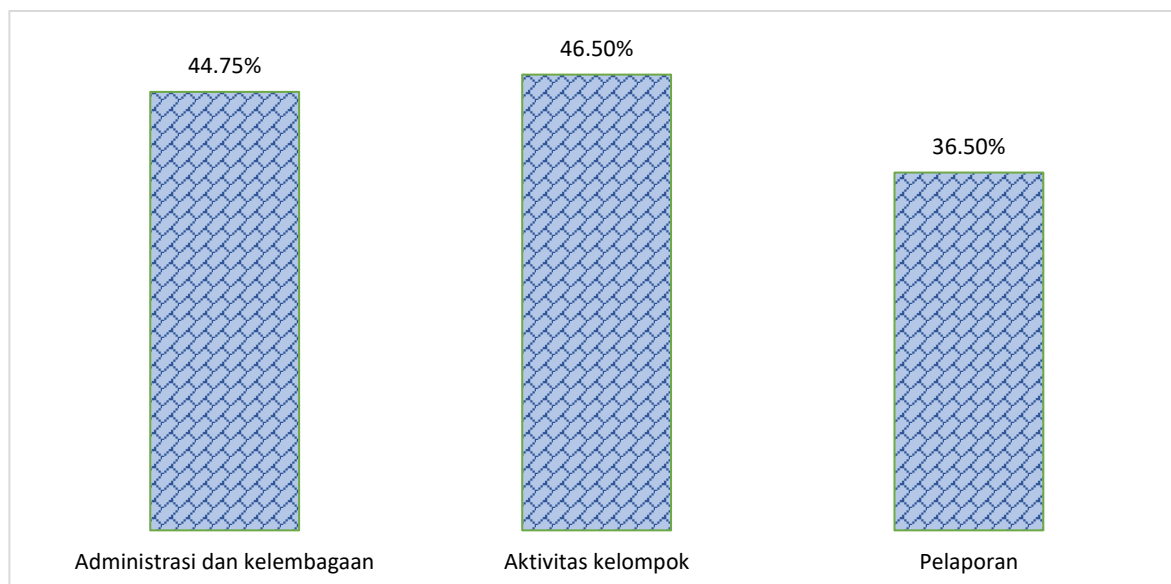
Rumus menghitung nilai:

$\text{Jumlah Skor} \times \text{Bobot} (\%) = \text{Nilai Maksimal Skor}$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kinerja Kelembagaan

Kelembagaan disebut juga sebagai suatu sistem dan struktur interaksi di antara anggota masyarakat atau organisasi yang memiliki keterikatan satu sama lain, yang dapat menentukan cara orang berinteraksi atau cara organisasi berhubungan, yang diatur dalam suatu entitas atau jaringan yang dipengaruhi oleh berbagai batasan serta ikatan beberapa norma, etika, dan regulasi baik yang resmi maupun yang tidak, berguna untuk mengatur perilaku sosial serta memotivasi kolaborasi dan pencapaian tujuan bersama (Istiqomah dkk., 2021).



Gambar 2. Kriteria penilaian.

Kinerja kelembagaan Hutan Desa Mesale memiliki keaktifan kelembagaan pada bagian aktivitas kelompok. Hasil olah data pada kriteria ini berdasarkan dari hasil wawancara terhadap semua responden. Untuk pertanyaan terkait aktivitas kelompok, semua responden memberikan jawaban yang berbeda-beda sehingga memperoleh presentase sejumlah 46,50%. Informasi yang diberikan oleh pendamping dari KPH, Kepala Desa, Pengurus dan anggota lembaga pengelola hutan desa Mesale menyatakan bahwa anggota hanya memahami akan perencanaan pemanfaatan hutan desa dan program rencana kerja. Setiap kegiatan yang sudah tercantum pada rencana kerja Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Mesale memerlukan pembinaan, dorongan dan dukungan

dari berbagai pihak terkait dengan pengetahuan administrasi serta penggunaan hutan desa perlu diberikan. Pengetahuan yang dimaksud mencakup pemahaman mengenai tugas dan fungsi, serta perencanaan dalam penggunaan hutan desa. Mesale menunjukkan kriteria yang masih berada pada tingkat penilaian cukup (40-60%). Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Mesale tergolong aktif, namun pengurus dan anggota hanya menyadari bagian dari aktivitas kelompok dan kurang memperhatikan aspek administrasi serta pelaporan. Diperlukan upaya sosialisasi dari instansi agar LPHD Mesale dapat memperluas pemahamannya dalam pengelolaan LPHD dan meningkatkan pengetahuan mengenai penggunaan serta manajemen HHBK di hutan desa Mesale.

## Administrasi Kelembagaan

Waruwu dkk. (2024) menyatakan bahwa dalam pengertian yang lebih spesifik, administrasi adalah proses pengorganisasian dan pencatatan data serta informasi secara teratur, bertujuan untuk menyajikan informasi dan memudahkan akses kembali secara menyeluruh. Berdasarkan wawancara dengan responden, diketahui bahwa Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Mesale telah terbentuk organisasi dan struktur kepengurusannya. Hal ini tentu bisa dimengerti karena salah satu ketentuan untuk mengajukan Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa adalah mencakup daftar pengurus Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) sesuai dengan Pasal 19 dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 83/2016, yang menyatakan bahwa permohonan PPHD harus dipresentasikan oleh kelompok masyarakat, gabungan kelompok masyarakat, atau koperasi bersama dengan daftar pengurusnya. Perlu ditekankan bahwa setiap individu yang terlibat dalam kegiatan pertanian tersebut pada dasarnya merupakan sebuah lembaga.

Struktur organisasi Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) memberikan banyak keuntungan penting bagi komunitas desa, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) membantu meningkatkan ekonomi masyarakat desa melalui pemanfaatan hasil hutan secara efisien, seperti melalui ekowisata atau produk non-kayu dari hutan, yang bisa menaikkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat. Selain itu, lembaga ini juga berperan dalam upaya melestarikan lingkungan, meminimalisir kerusakan hutan, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan manajemen hutan. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) memperkuat identitas budaya, menyelesaikan potensi konflik, dan menjaga keamanan hutan dari kegiatan ilegal, menjadikannya sebagai contoh pengelolaan hutan yang ramah dan berkelanjutan.

Penyusunan tugas yang tegas adalah elemen yang sangat krusial dalam setiap organisasi. Setiap kelompok atau organisasi yang dibentuk perlu memiliki pengaturan yang jelas, sehingga tugas dapat dibagi dengan baik selama kegiatan berlangsung (Irawan, B. 2019). Sementara itu, menurut (Tuyuwale dalam Makawekes, N., 2016), salah satu aspek yang berpengaruh besar terhadap dinamika kelompok adalah rendahnya efektivitas

dalam menjalankan tugas guna mencapai tujuan. Penelitian yang dilakukan oleh Yenny (2022) menunjukkan bahwa tingkat keaktifan sebuah kelompok berbanding lurus dengan dampak yang dihasilkan terhadap kapasitas lembaganya. Pembagian peran dalam suatu organisasi sangat penting agar tidak terjadi overlapping dalam pelaksanaan tugas. Setiap individu memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang telah ditentukan.

Berdasarkan pendapat Ordway Tead tahun 1960 dalam (Cristianingsih, 2020) diungkapkan bahwa "Administrasi diartikan sebagai aktivitas individu (eksekutif) dalam suatu organisasi yang memiliki peran dalam mengelola, mengembangkan, dan menyediakan sarana untuk kerja sama sekelompok orang demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam studi ini, catatan administrasi dianggap lengkap jika mencakup seluruh 4 elemen, yaitu buku kas, buku pendaftaran anggota, buku tamu, dan buku inventaris. Hasil wawancara dengan responden di bidang administrasi Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Mesale masih tergolong kurang dikarenakan dari keempat aspek penilaian administrasi yang dijalankan sampai saat ini hanya buku kunjungan tamu yang dijalankan. Kurangnya pemahaman Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) dalam menjalankan administrasi kelembagaan dapat menghambat efektivitas operasional lembaga tersebut. Administrasi kelembagaan yang tidak terkelola dengan baik akan menyebabkan terjadinya ketidakjelasan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab antar pengurus, serta kesulitan dalam pengelolaan sumber daya dan pengawasan kinerja. Tanpa pemahaman yang mendalam mengenai struktur organisasi, prosedur administrasi, dan sistem pelaporan yang jelas, proses pengambilan keputusan dalam Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) menjadi terhambat dan tidak efisien. Hal ini juga dapat menimbulkan masalah dalam hal transparansi, akuntabilitas, serta pengelolaan dana yang dapat merugikan lembaga itu sendiri dan masyarakat yang diharapkan mendapatkan Manfaat menjalankan program. Karena itu, pemahaman yang baik tentang tata kelola administrasi kelembagaan sangat penting untuk menciptakan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) yang profesional, transparan, dan efektif dalam melaksanakan tugasnya.

Menurut hasil wawancara terhadap para responden pada kawasan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD), tidak terdapat norma atau aturan yang tertulis yang mengatur tentang pengelolaan kawasan dan perlindungan terhadap

lingkungan sekitarnya. Akan tetapi, perlindungan tersebut hanya diberi penekanan melalui papan nama peringatan yang dipasang di pintu masuk kawasan. Papan tersebut berfungsi sebagai pemberitahuan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dan mematuhi aturan yang ada, meskipun tidak ada pengawasan atau penegakan hukum yang lebih ketat di lapangan. Hal ini menunjukkan adanya perhatian terhadap kelestarian kawasan, namun dengan keterbatasan dalam penerapan norma secara lebih menyeluruh. Perlindungan terhadap kawasan tersebut umumnya hanya diberlakukan melalui pemasangan papan nama peringatan di pintu masuk, yang berfungsi sebagai pemberitahuan bagi masyarakat atau pengunjung untuk mematuhi aturan yang ada. Meskipun demikian, bagi Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD), adanya aturan tertulis dan tanda peringatan tersebut memiliki manfaat penting dalam menjaga kelestarian hutan, meminimalkan kerusakan lingkungan, dan mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Selain itu, aturan ini juga memberikan kepastian hukum bagi kelompok pengelola hutan dalam mempertahankan hak mereka atas kawasan yang dikelola, serta mendukung upaya konservasi yang lebih efektif.

Semua responden memberikan jawaban yang berbeda-beda sehingga memperoleh presentase sejumlah 44,75%. Berdasarkan analisis yang dilakukan kriteria ini tergolong pada kategori cukup karena memperoleh nilai presentase nilai (40-60), administrasi kelembagaan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Mesale dikatakan cukup dikarenakan hanya mempunyai buku notulen pertemuan yang dijadikan sebagai pelaporan akhir kepada pendamping, masyarakat hutan desa Mesale lebih memahami akan pemanfaatan hasil hutan dibandingkan kelengkapan administrasi kelembagaan, maka dari itu perlu dilakukan sosialisasi kepada pengurus akan pentingnya administrasi untuk bisa menjalankan roda organisasi dengan baik.

### **Aktivitas Kelompok**

Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat untuk menerapkan teknik manajemen hutan dan bertanggung jawab dalam melestarikannya. Keberadaan LPHD sangat penting bagi masyarakat dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan yang mereka kelola serta mendukung perekonomian komunitas di sekitar area hutan. Salah satu ukuran keberhasilan LPHD

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tercermin dalam kegiatan agroforestri (Salma, S., & Umar, S. 2020). LPHD Mesale berkomitmen untuk memperkuat kapasitas organisasinya dengan memberikan pelatihan kepada para anggotanya. Melalui program pelatihan ini, anggota dapat mengembangkan karir mereka, memperluas jaringan profesional, dan memiliki kesempatan untuk mengisi posisi yang lebih tinggi atau terlibat dalam proyek yang lebih besar. Selain itu, pelatihan juga berkontribusi pada peningkatan motivasi dan kepuasan kerja, karena anggota mendapatkan pengakuan serta kesempatan untuk berkembang lebih lanjut. Pelatihan ini juga memfasilitasi anggota LPHD untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dalam masyarakat, termasuk kemajuan teknologi dan dinamika sosial politik, agar tetap relevan dan mampu memberikan kontribusi secara optimal. Mengingat berbagai manfaat ini, pelatihan dianggap sebagai investasi penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di LPHD. Tingkat partisipasi anggota LPHD dalam pelatihan dikenal baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan semua responden, ditemukan bahwa hampir 95% anggota LPHD telah berpartisipasi dalam program pelatihan. Program pelatihan tersebut umumnya diadakan oleh lembaga pemerintah atau LSM Sikola Mombine.

Kelompok Usaha Perhutn Sosial Pembangunan (KUPS) Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Mesale didirikan pada 23 Juni 2023 di Kantor Desa Malitu. Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Mesale telah merancang dan melaksanakan rencana aksi bisnis dengan tiga cabang, yaitu: KUPS Gula Aren dan Gula Kelapa, yang akan dikenal sebagai KUPS Lestari, KUPS Bambu dan Nibong yang akan dikenal sebagai KUPS Fargesia, dan berdasarkan umpan balik dari pengurus serta anggota, akan diperkenalkan jenis usaha lain yang dinamakan KUPS Rotan. Atau dengan nama SK KUPS Madago Raya. Usaha yang dijalankan oleh Mesale Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) dalam segala jenisnya telah menjadi sumber pendapatan utama bagi komunitas lokal. Pertumbuhan kelompok usaha hasil hutan bukan kayu (HHBK) menjadi salah satu pilihan utama yang sangat diminati oleh masyarakat, terutama di daerah dengan potensi hutan yang besar. Ini tidak hanya menawarkan peluang ekonomi yang menguntungkan, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Selain itu, perusahaan hasil hutan non kayu memiliki peran vital dalam menjaga lingkungan, sebab mereka



dapat mengurangi tekanan terhadap penebangan hutan yang berlebihan dengan memberikan nilai tambah pada produk hutan yang berkelanjutan. Dengan manajemen yang baik, usaha-usaha HHBK dapat menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengoptimalkan sumberdaya alam dengan cara-cara yang cerdas dan berkelanjutan.

Upaya kelompok dalam pemulihan dinilai berdasarkan apakah mereka telah menanam pohon dan membangun struktur konservasi tanah dan air. Ini termasuk bangunan seperti stasiun pemadam kebakaran, pos pengintaian, dan waduk air. Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Mesare belum melakukan restorasi vegetasi atau pembangunan bangunan untuk konservasi tanah dan air, dikarenakan rata-rata vegetasi tanaman tidak berkayu yang tumbuh di Kawasan. Belum dilakukannya kegiatan rehabilitasi dalam kawasan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya keterbatasan sumber daya dan pendanaan yang tersedia, serta kurangnya koordinasi antara pihak-pihak terkait, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun pihak swasta. Selain itu, tantangan dalam pengelolaan kawasan yang masih memiliki masalah terkait peraturan dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya rehabilitasi hutan juga menjadi hambatan. Faktor teknis seperti identifikasi area yang perlu direhabilitasi dan pemilihan metode yang sesuai dengan kondisi lokal juga mempengaruhi keterlambatan pelaksanaan kegiatan tersebut. Manfaat dilakukannya kegiatan rehabilitasi dalam kawasan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) sangat signifikan, baik bagi lingkungan maupun masyarakat setempat. Rehabilitasi hutan dapat mengembalikan fungsi ekosistem, seperti peningkatan kualitas tanah, pemulihan sumber air, serta meningkatkan keanekaragaman hayati yang mendukung keseimbangan alam. Bagi masyarakat, kegiatan ini membuka peluang untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, seperti hasil hutan non-kayu atau ekowisata. Selain itu, rehabilitasi juga dapat memperkuat ketahanan bencana, mengurangi erosi, dan meningkatkan cadangan karbon, yang pada gilirannya berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim. Dengan demikian, rehabilitasi di kawasan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) tidak hanya memberikan manfaat ekologis, tetapi juga sosial dan ekonomi bagi komunitas desa.

Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Mesale belum memiliki koperasi tetapi telah bekerjasama dengan mitra. Koperasi memiliki

peran yang sangat penting bagi lembaga seperti Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD), terutama dalam konteks memperkuat kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) belum memiliki koperasi, kerja sama dengan mitra-mitra yang relevan dapat memberikan manfaat besar dalam hal akses ke modal, pemasaran produk, dan pelatihan manajerial. Koperasi dapat menjadi wadah yang efektif untuk mengorganisir anggotanya, mengelola sumber daya secara kolektif, serta memperkuat daya tawar dalam menghadapi pasar. Melalui koperasi, Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) bisa meningkatkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, sekaligus menciptakan kesempatan ekonomi yang adil di daerah pedesaan.

Pertemuan yang rutin sangat penting bagi lembaga karena dapat memperkuat komunikasi antar anggota, meningkatkan koordinasi, dan memastikan bahwa setiap tujuan serta rencana kerja dapat terlaksana dengan baik. Melalui pertemuan berkala, lembaga dapat mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai, mengidentifikasi masalah yang muncul, serta mencari solusi secara bersama-sama. Selain itu, pertemuan rutin juga menciptakan kesempatan bagi anggota untuk berbagi informasi dan ide, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi lembaga secara keseluruhan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, dapat diidentifikasi bahwa Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Mesale menjalankan kegiatan pertemuan rutin dengan frekuensi sekali dalam sebulan. Pertemuan tersebut difokuskan pada evaluasi dan pembahasan mengenai perkembangan dan kemajuan kelompok tani yang berada di bawah binaan mereka. Dalam pertemuan ini, LPHD berusaha untuk mengukur sejauh mana efektivitas program-program yang telah diterapkan, serta memberikan masukan dan arahan guna meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan pemberdayaan masyarakat.

Penilaian terhadap aktivitas kelompok tani tersebut dilakukan berdasarkan sejumlah kriteria yang mencakup berbagai aspek operasional dan sosial. Dari hasil penilaian yang dilakukan, diperoleh angka 46,50% yang menunjukkan bahwa kinerja kelompok tani berada pada kategori "cukup baik." Persentase ini mencerminkan adanya upaya dan hasil yang patut diapresiasi, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan lebih lanjut agar kelompok tani dapat beroperasi lebih optimal dan efisien. Kategori "cukup baik" juga mengindikasikan bahwa terdapat tantangan

dan hambatan tertentu yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan kualitas kerja dan pencapaian kelompok tani ke depannya.

Secara keseluruhan, meskipun Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Mesale telah melaksanakan pertemuan rutin yang cukup terstruktur, penilaian yang menunjukkan hasil "cukup baik" mengisyaratkan perlunya peningkatan dalam aspek koordinasi, pengelolaan program, dan dukungan terhadap kelompok tani. Hal ini menjadi tantangan bagi Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) untuk terus mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pemberdayaan, sehingga dapat mencapai hasil yang lebih signifikan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

### **Pelaporan**

Salah satu kendala yang sering dihadapi dalam mengelola pelaporan dan analitik adalah akurasi data, kendala ini bisa mengakibatkan keputusan yang tidak tepat dan menghambat efektivitas proses evaluasi (Sihotang dkk., 2024). Hasil wawancara responden mengatakan bahwa pelaporan dan dokumentasi Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) masih sangat kurang dan sering terlambat dikarenakan pemahaman pengurus tentang administrasi masih lemah, bisa lemahnya dikarenakan tidak ada keterampilan atau pelatihan yang cukup untuk mengelola pelaporan administrasi dan kurangnya pengawasan atau evaluasi dari pendamping sehingga kelembagaan tidak menyadari atau memperbaiki kelemahan dalam pelaporan administrasi. Pelaporan yang tidak tepat waktu dan tidak lengkap dapat menghambat proses pengambilan keputusan yang efektif, menyebabkan ketidakjelasan dalam pemantauan perkembangan, dan menurunkan akurasi informasi yang diperlukan untuk merumuskan kebijakan yang tepat. Ketidakpatuhan terhadap jadwal pelaporan serta kurangnya detail dalam laporan akan mempersulit pihak yang berkepentingan dalam memahami situasi terkini, sehingga meningkatkan risiko kesalahan dalam tindakan yang diambil.

Dokumentasi kegiatan yang tidak lengkap, mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan distribusi, dapat menyebabkan kesulitan dalam melakukan evaluasi dan audit atas keseluruhan proses. Ketidak terperinciannya informasi pada setiap tahap kegiatan menghambat transparansi, mempersulit identifikasi kendala yang muncul, serta mengurangi akurasi dalam pelaporan dan perencanaan untuk kegiatan serupa di masa depan. Untuk memastikan lembaga tetap berjalan dengan

baik meskipun dokumentasi kegiatan mulai dari persiapan hingga distribusi tidak lengkap, solusi yang dapat diterapkan adalah dengan segera melakukan perbaikan sistem dokumentasi yang lebih terstruktur dan sistematis. Hal ini meliputi pembuatan prosedur baku dalam pencatatan setiap tahap kegiatan, pelatihan bagi seluruh pihak yang terlibat untuk memastikan mereka memahami pentingnya dokumentasi yang lengkap dan akurat, serta penggunaan teknologi atau sistem manajemen yang dapat mempermudah pencatatan dan penyimpanan data secara digital. Selain itu, evaluasi berkala terhadap proses dokumentasi dan implementasi kontrol internal yang lebih ketat juga perlu dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kekurangan yang ada, memastikan bahwa proses operasional berjalan lancar dan transparan. Penelitian pada kriteria pelaporan memperoleh nilai presentase 36,50%, sehingga tergolong kedalam kriteria kurang (0-40).

### **Faktor yang mempengaruhi kelembagaan LPHD Mesale**

Faktor utama yang ada di Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Mesale adalah kurangnya dana untuk operasional mereka. Pemerintah desa, yang berwenang mengeluarkan SK pembentukan pengurus dan anggota LPHD Mesale, tidak dapat mengalokasikan anggaran desa dari APBDes untuk dikelola oleh LPHD Mesale karena pengalokasian dana tersebut telah ditetapkan sebelumnya. Masalah terkait pendanaan ini perlu dibahas dengan instansi yang relevan melalui dukungan dari pendampingan perhutanan sosial LPHD Mesale agar program kerja mereka dapat berhasil. Kerjasama antara LPHD, masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, instansi yang berhubungan, serta pendamping lapangan dalam meningkatkan pendanaan akan sangat membantu agar program yang telah direncanakan dapat berjalan dengan efektif. Dengan bantuan pendamping, pengelola hutan desa bisa lebih mudah mendapatkan akses kepada pemangku kepentingan terkait pengoptimalan program kerja sebagai jalan keluar dari permasalahan yang ada (Maiwa dkk., 2023).

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis terhadap kinerja kelembagaan Hutan Desa Mesale dapat disimpulkan bahwa kelembagaan hutan desa Mesale tergolong dalam kategori cukup baik, namun masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki agar lebih efektif. Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Malitu,

khususnya anggota Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD), hanya memahami aspek pemanfaatan hutan, sementara pemahaman tentang perencanaan pengelolaan dan administrasi hutan masih terbatas. Keterangan dari pendamping KPH, Kepala Desa, serta pengurus dan anggota LPHD menyebutkan bahwa meskipun masyarakat telah terlibat dalam pemanfaatan hutan, mereka kurang memiliki pengetahuan yang memadai mengenai perencanaan jangka panjang dan strategi pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Hal ini menciptakan celah dalam manajemen kelembagaan, di mana LPHD Mesale tidak sepenuhnya mampu berfungsi dengan optimal. Faktor utama yang mempengaruhi kinerja kelembagaan adalah terbatasnya pendanaan, yang menghambat proses pembinaan, pelatihan anggota, dan pengembangan kapasitas. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengoptimalkan kinerja LPHD dengan meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat, serta pengelolaan hutan yang lebih berkelanjutan. Hal ini akan berdampak positif bagi kesejahteraan desa dan keberlanjutan ekosistem hutan.

#### UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako yang telah memberikan dukungan berupa sarana dan sumber daya yang sangat membantu dalam penelitian ini. Penulis juga menghargai Pusat MBKM Universitas Tadulako yang telah meluncurkan program magang mandiri sebagai inisiatif baru untuk mempercepat proses pembelajaran mahasiswa, serta memberi fasilitas dan program untuk mengasah minat serta bakat mahasiswa melalui program tersebut. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada KPH Sintuwu Maroso sebagai institusi yang telah memberikan bantuan dalam pelaksanaan penelitian ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, H. R. I. (2021). *Pengantar metodologi penelitian*. SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Apriandana, F., Safe'i, R., Febryano, I. G., & Kaskoyo, H. (2021). Kinerja lembaga pengelola hutan desa Muara Danau Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. *ULIN: Jurnal Hutan Tropis*, 5(1), 17-22.  
<https://doi.org/10.32522/ujht.v5i1.4413>
- Apriandana, F., Safe'i, R., Febryano, I. G., & Kaskoyo, H. (2021). Pengelolaan hutan desa di KPH wilayah VIII Semendo dari perspektif kinerja kelembagaan. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekon Kehutanan*, 18, 185-204.
- Apriandana, F., Safe, R., Febryano, I. G., & Kaskoyo, H. (2021). Dari perspektif kinerja kelembagaan: Village forest management in Semendo FMU region VIII from institutional rules. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 18(3), 185–203.
- Wijaya, B. H. F. (2021). Kinerja kelembagaan kelompok tani hutan kemasyarakatan di Kabupaten Tanah Laut. *Jurnal Sylva Scientiae*, 03(1).
- Cristianingsih, E. (2020). Implementasi kebijakan administrasi kependudukan di Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi*, 12(2), 162-170.
- Damanik, S. E. (2019). *Pemberdayaan masyarakat desa sekitar kawasan hutan*. Jakarta: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Hendra Pribadi, A. M. (2023). Sikap dan perilaku masyarakat terhadap rencana pengelolaan hutan desa di Sulawesi. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 17(1), 1-11.
- Irawan, B. (2019). Organisasi formal dan informal: Tinjauan konsep, perbandingan, dan studi kasus. *Jurnal Administrative Reform*, 6(4), 195-220.
- Istiqomah, Udiansyah, & Hamdani Fauzi. (2021). Kinerja kelembagaan kelompok tani hutan pemegang izin perhutanan sosial di wilayah kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan Kayutangi. *Jurnal Sylva Scientiae*, 04(3), 440–451.
- Mahendra, I. Z. (2022). Peranan lembaga pengelolaan hutan desa dalam mengelola hutan desa Rimbo Pusako Batang Terab Desa Jelutih berdasarkan Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2010 tentang penetapan lembaga Rimbo Pusako Batang Terab sebagai lembaga desa pengelola hutan desa (Doctoral dissertation, Ilmu Hukum). Universitas Jambi, Jambi.
- Maiwa, A., Rahman, A., Pribadi, H., Hamka, H., Baharuddin, R. F., & Jardan, G. (2023). The role of stakeholders in natural tourism management of Kapopo Forest Park, Central Sulawesi. *Jurnal Penelitian Kehutanan BONITA*, 5(2), 28-37.
- Maiwa, A., Umar, S., Golar, G., & Rahman, A. (2018). Resolusi konflik dalam pengelolaan Taman Nasional Lore Lindu. *Jurnal Warta Rimba*, 6(2).
- Puspitasari, D. A. (2020). Pengaruh persepsi,

- pengetahuan akuntansi, dan penghargaan finansial terhadap minat mahasiswa program studi akuntansi untuk berkarir di bidang akuntan publik (Doctoral dissertation, Universitas Bhayangkara).
- Salma, S., & Umar, S. (2020). Inisiatif masyarakat terhadap pemanfaatan hutan desa Mire Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una. *Jurnal Warta Rimba*, 8(3), 205-213.
- Sihotang, L., & Meilantika, F. R. (2024). Evaluasi implementasi sistem informasi akuntansi manajemen. *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik*, 2(2), 422-429.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sulastri, W., & Suhartoyo, H. (2019). Evaluasi pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm) dan perubahan tutupan lahan pada areal izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan (IUPHKM) Desa Ujan Mas Atas Kabupaten Kepahiang. *Naturalis: Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, 8(1), 77-86.
- Tuyuwale, A. (2016). Dinamika kelompok dan efektivitas tugas dalam organisasi. In N. Makawekes (Ed.), *Dinamika kelompok dan pembagian tugas* (pp. 45-58).
- Uma, K. (2022). Kinerja kelembagaan Gapoktan pemegang izin perhutanan sosial di KPH Batutege Provinsi Lampung. Yogyakarta: UGM.
- Triambodo, S., & Damanik, J. (2015). Analisis strategi penguatan kelembagaan desa wisata berbasis ekonomi kreatif (Studi di Desa Wisata Kerajinan Tenun Dusun Gamplong, Desa Sumberrahayu, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, DIY). Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Yeny, I., Karlina, E., Suharti, S., Murniati, Subarudi, & Nurlia, A. Gunawan, H. (2022). Integrating social forestry and biodiversity conservation in Indonesia. *Forests*, 13(12), 2152. <https://doi.org/10.3390/f13122152>
- Waruwu, W. A., Mendrofa, M. S. D., Waruwu, E., & Gea, J. B. I. J. (2024). Analisis manajemen kearsipan dalam upaya meningkatkan pengelolaan penatausahaan administrasi di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Gunungsitoli. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA)*, 4(2), 702-715.
- Wulandari, C., & Inoue, M. (2018). The importance of social learning for the development of community-based forest management in Indonesia: The case of community forestry in Lampung Province. *Small-scale Forestry*, 17(3), 361–376. <https://doi.org/10.1007/s11842-018-9392-7>